

BAB XV

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

I. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK Outcome

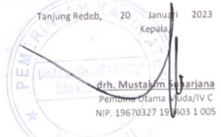
Konsep/Definisi	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Rumus	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKTL) + (0.099 \times IKAL)$ $IKLH = (0.30 \times IKA) + (0.30 \times IKU) + (0.40 \times IKTL)$ atau $IKLH \text{ Kab/Kota} = (IKA \times 0.376) + (IKU \times 0.405) + (ITH \times 0.219)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut
Isian Data	IKA = 63.48, IKU = 83.76, ITH = 84.64, IKLH = 74.75
Keterangan	Definisi: IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dan sederhana tentang kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional 2020-2024 meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi

Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
 Kepala,

 drh. Mustafim Suhariana
 Pembina Utama Muda/IV C
 NIP. 196703271994031005

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	1) Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $\text{Nilai relatif} = \frac{C_u}{C_s}$ $IP = \sqrt{\frac{[C_u]_{\text{pau}}^2 + [C_u]_{\text{pau}}^2}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq P_1 \leq 1.0 \rightarrow \text{baik (permissible/baik sekali)}$ $1.0 < P_1 \leq 1.5 \rightarrow \text{cukup bagus}$ $1.5 < P_1 \leq 1.8 \rightarrow \text{cukup sedang}$ $P_1 > 1.8 \rightarrow \text{cukup berat}$ $IKTL = 100 - [(84.3 - (TH \times 100)) \times \frac{20}{54.3}]$ $IKTL = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	IKLH = 74.75 IKA = 63.48 IKU = 83.76 ITH = 84.64	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

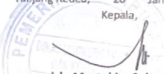
Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
 Kepala,

 drh. Mustafim Suhariana
 Pembina Utama Muda/IV C
 NIP. 196703271994031005

2) IKK Outcome : Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota
Rumus	$\frac{\text{Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota}} \times 100\%$
Isian Data	50,16%
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota meliputi pengelolaan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota, menyediakan TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul sampah, melakukan pengangkutan sampah ke TPS, TPS 3R, TPA dan TPST, pada fase pengolahan dilakukan proses daur ulang, pengomposan, selanjutnya pada fase akhir dilakukan proses pengurangan yang bersifat terkendali. Kriteria: Kriteria: penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi


Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
Kepala,


drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19670327 199403 1 005

Penjelasan IKK Output


IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan 	<p>Tersedia</p> <p>Tersedia</p> <p>Tersedia</p>	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)

Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
Kepala,


drh. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda/IV C
NIP. 19670327 199403 1 005

3) IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Penjelasan IKK Outcome


Konsep/Definisi	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			
Rumus	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$			
Isian Data	<table border="1"> <tr><td>27</td></tr> <tr><td>28</td></tr> <tr><td>96.43 %</td></tr> </table>	27	28	96.43 %
27				
28				
96.43 %				
Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Yang dimaksud dengan izin pph (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi 			

Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
 Kepala

 drh. Mustafim S. Harjana
 Pembina Utama Muda/IV C
 NIP. 19670327 198403 1 005

- Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan				
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Ijin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	<table border="1"> <tr><td>10</td><td>100</td></tr> <tr><td>10</td><td></td></tr> </table>	10	100	10		Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala
	10	100						
10								
2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Ijin lingkungan PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota}} \times 100\%$	Tidak Ada	sda					

3)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab / kota	Jumlah MHA yang dilakui x 100% Jumlah usulan MHA Masyarakat Hukum Adat adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun	Tidak Ada	sda
4)	Terasilinasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan x 100% Jumlah MHA yang ada	Tidak Ada	sda
5)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana x 100% Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	Tidak Ada	sda
6)	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani x 100% Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terintegrasi	13 / 100 13	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)


 Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
 Kepala
 drh. Mustakim Siharjana
 Pembina Utama Muda/IV C
 NIP. 19670327 199403 1 005

BAB XXXII INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota

1) IKK Output

Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Isian Data	Keterangan
	1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	-	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait, yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah (Kepala OPD)
	2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	8 Kampung	Kampung Teluk Semarling, Kampung Kasai, Kampung Batu-batu, Kampung Pulau Besing, Kampung Buyung-buyung, Long Ayan, Long Lanuk, Kampung Pesayan
	3) Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	-	Tidak Ada
	4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	-	Tidak Ada

Tanjung Redeb, 20 Januari 2023
 Kepala
 drh. Mustakim Baharjana
 Pembina Utama Muda/IV C
 NIP. 19670327 199403 1 005